



Praktik Kekuasaan Politik Machiavelli dalam Pemerintahan Presiden Soeharto pada Masa Orde Baru

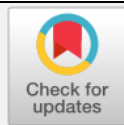
Mutiara Hardewita¹

¹ Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 25171, Sumatera Selatan-Indonesia

*Korespondensi: mutiarahardewita@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Tanggal Terbit:
30 Maret 2025



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2025 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Hardewita, M. (2025). Praktik Kekuasaan Politik Machiavelli dalam Pemerintahan Presiden Soeharto pada Masa Orde Baru. *Journal of Politics and Democracy*, 4(2), 114-125.
<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v4i2.81>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pemikiran politik Niccolò Machiavelli mengenai kekuasaan dengan praktik politik Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan historis. Sumber primer berasal dari karya Machiavelli, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Machiavelli tentang kekuasaan yang harus dipertahankan dengan segala cara tercermin dalam kebijakan Soeharto, antara lain melalui pembunuhan massal terhadap pihak yang dituduh komunis, penembakan misterius terhadap kelompok kriminal, dan pembungkaman pers. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan dengan mengutamakan stabilitas negara meskipun bertentangan dengan nilai moral. Dengan demikian, pemikiran Machiavelli tetap relevan untuk memahami strategi kekuasaan otoritarian di Indonesia pada masa Orde Baru. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kajian historis dalam membaca praktik politik kontemporer, di mana teori klasik dapat digunakan untuk menjelaskan realitas kekuasaan yang otoritarian.

This article aims to analyze the relationship between Niccolò Machiavelli's political thought on power and the political practices of President Soeharto during the New Order era. The study employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods and a historical perspective. Primary sources are drawn from Machiavelli's works, while secondary sources are obtained from books and relevant journal articles. The findings indicate that Machiavelli's idea that power must be preserved by any



means is reflected in Soeharto's policies, including mass killings of those accused of communism, mysterious shootings of criminal groups, and the silencing of the press. These practices demonstrate that power was exercised by prioritizing state stability, even when it contradicted moral values. Thus, Machiavelli's political thought remains relevant to understanding authoritarian strategies of power in Indonesia during the New Order. The study also emphasizes the importance of historical inquiry in interpreting contemporary politics, showing how classical theories can be applied to explain authoritarian practices of power.

Kata Kunci: Machiavelli; Orde Baru; Otoritarianisme; Kekuasaan Politik; Soeharto

1. Pendahuluan

Penelitian ini berangkat dari pemikiran politik Niccolò Machiavelli tentang kekuasaan yang menekankan bahwa kekuasaan harus dipertahankan dengan segala cara, bahkan jika cara tersebut bertentangan dengan nilai moral. Pemikiran ini menjadi titik pijak untuk membaca praktik politik Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan berhasil dipertahankan selama lebih dari tiga dekade melalui berbagai strategi politik, represi, dan kontrol sosial. Dengan menempatkan teori Machiavelli sebagai kerangka analisis, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana gagasan tentang kekuasaan yang realistis dan utilitarian dapat ditemukan dalam kebijakan dan tindakan politik Soeharto. Fokus ini memberikan kontribusi pada kajian politik Indonesia dengan menyoroti hubungan antara teori klasik tentang kekuasaan dengan praktik kekuasaan yang terjadi dalam konteks historis Orde Baru.

Politik adalah suatu hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan suatu negara. Dimana politik akan menunjukkan kemana arah sebuah negara akan bergerak, memiliki daya, dan segala aturannya, yang digunakan untuk terciptanya kedamaian bagi rakyat dalam negara tersebut. Politik mengarah kepada sebuah kota yang mempunyai status negara, dalam politik juga menyangkut bagaimana hubungan kekuasaan, ada pula mengenai hubungan antara warga yang satu dengan warga yang lain dalam negara, hubungan antara warga dengan negaranya, bahkan menyangkut hubungan yang dijalin antarnegara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terdapat pengertian politik, yaitu pengetahuan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan negara, misalnya bagaimana sistem pemerintahan sebuah negara, dan dasar pemerintahannya, termasuk apa saja urusan dan tindakan yang dilaksanakan untuk pemerintahan negara dan negara lain, bisa dalam bentuk kebijakan dan strategi, berupa kebijaksanaan dalam meluluhlantahkan atau menangani suatu masalah (Latif, 2024). Dunia politik bagi beberapa oknum bahkan masyarakat, nampak sebuah hal yang sederhana, politik ya politik, kehidupannya hanya kehidupannya, tidak ada pengaruhnya. Namun patut disadari, dalam hidup bermasyarakat juga politik berpengaruh terhadap kehidupan, karena dimanapun setiap masyarakat menyanggah status warga negara yang diatur pemerintahan. Politik banyak mempengaruhi segi-segi kehidupan suatu negara dan memiliki kekuatan hingga dapat mengubah suatu sistem dan struktur dan tatanannya. Bagi oknum lainnya yang berkecimpung dalam pemerintahan, tentu hal yang mengenai politik tidak dapat ditinggalkannya, dan digunakan untuk menunjang kehidupannya, bahkan untuk memperoleh kekuasaan.

Sebagaimana dalam pandangan Harold Laswell, mengenai politik, dimana politik digunakan untuk siasat terhadap beberapa aspek negara, seperti pembentukan dan pembagian kekuasaan. Kekuasaan harus dipertahankan dalam jangka masa tertentu dan dengan metode yang pasti. Dimana-mana terdapat kekuasaan, namun sulit untuk didapatkan, dan sulit juga untuk dilepaskan. Kekuasaan pada umumnya dapat berupa kuasa yang bersifat negatif dan bersifat positif, idealnya semua yang dikuasai oleh penguasa haruslah mendapatkan yang positif dan menghilangkan yang negatif. Oleh Max Weber juga, bahwa defenisi dari kekuasaan, yaitu kesanggupan yang dimiliki dalam suatu hubungan sosial dalam melaksanakan suatu kemauan tersendiri, walaupun mengalami sebuah penolakan. Bahwa terlihat juga kekuasaan mendapat posisi tinggi, hingga sulit dilawan. Kemudian uraian mengenai kekuasaan dalam konsepnya tersendiri, Michel Foucault mengatakan kekuasaan memiliki sesuatu yang divalidasikan kepada negara, sehingga adanya kemungkinan negara dapat mengharuskan semua warga untuk mematuhi si penguasa, kekuasaan dapat diukur dan terdapat dimana saja, karena Foucault menganggap bahwa kekuasaan adalah satu aspek dari sebuah relasi, dimana relasi menciptakan sebuah kekuasaan (Siregar, 2021).

Machiavelli, atau dengan nama panjang yaitu Niccolo Machiavelli, adalah seorang filsuf barat pada zaman renaissans barat, keberadaan yang berpengaruh terhadap politik, serta konsep kekuasaan. Machiavelli berasal dari Italia, dan memiliki karya salah satunya mengenai politik adalah *Il Principe*, yang memiliki arti Sang Penguasa, yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi *The Prince*, yang dalam bahasa Indonesia berarti Sang Pangeran. Tersebutlah buku karya Machiavelli merupakan hasil observasinya terhadap pangeran-pangeran di Italia, dengan berbagai gaya kepemimpinan masing-masing. Dalam bukunya memuat bagaimana seorang pangeran mempertahankan kestabilan politik dalam sebuah negara. Pandainya pangeran membaca situasi dan memilih tindakan yang akurat dalam memberantas problematika yang terjadi di negara, adalah sebuah keharusan dimiliki pangeran sebagai kemampuan dasar (Fahrezy & Al-Hamid, 2021).

Dalam pandangan Machiavelli, kekuasaan harus dipertahankan dengan cara apapun, walau cara-cara yang digunakan bertolak belakang dengan ajaran moral. Banyak pandangan negatif dari orang lain terhadap pandangan beliau ini, dan dianggap diktator (Fahrezy & Al-Hamid, 2021). Machiavelli mengatakan bahwa kekuasaan dibangun atas perbuatan untuk tujuan yang baik, yaitu digunakan untuk kepentingan warga negara, dan kedamaian umum, sehingga mewujudkan stabilnya kondisi politik yang baik pula. Hingga jika kebalikannya, jika suatu kekuasaan didirikan dengan pondasi kepentingan untuk seekelompok oknum tertentu, akan menimbulkan kekacauan dalam kestabilan negara. Konsep kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli diacukan kepada diskusi politik yang memiliki karakteristik realitas, dan tidak adanya hubungan dengan nilai normatif, yang bersifat mengatur. Namun, pemikiran oleh Machiavelli tidak terlepas dari hal yang diutamakan, yaitu kepentingan rakyat (Syarofuzzaman, 2024).

Dalam pandangan kekuasaan menurut Machiavelli, peneliti ingin melihat bagaimana konsepnya yang realitas dalam perpolitikan yang dialami Indonesia Pada masa Orde Baru, dimana terlihat penguasa dalam periode ini, yaitu presiden Soeharto, memiliki jangka panjang dalam berkuasa, dibandingkan dengan penguasa lainnya, dan praktek politik apa saja yang dilakukan selama masanya hingga bertahannya kekuasaan.

Masa jabatan presiden Soeharto adalah zaman Orde Baru adalah dimana masa rezim pemerintahan yang diperlihatkan terdapatnya kekerasan, sehingga penguasa memiliki

kekuasaan selama 32 tahun, dari tahun 1966 sampai dengan 1998, dengan satu tokoh penguasa adalah Soeharto. Beberapa praktek kekuasaan dianggap terlalu brutal dan mengekang. Terdapat pada masa ini peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan kepada siapa saja yang dinyatakan mempunyai pertalian dan sangkut paut, serta terlibat bersama komunis. Pembantaian ini dilakukan atas perintah, demi keamanan dan ketertiban negara. Juga dalam penembakan misterius kepada kelompok bertato, yang dipandang mengganggu keamanan masyarakat. Pembungkaman terhadap rakyat juga dilakukan dalam bentuk larangan pers, seperti koran yang dilarang terbit, demi mengamankan negara dari pemberontakan rakyat yang tidak sesuai kemauan pemerintah, dan melawan kekuasaan (Eddyono, 2021). Dari contoh peristiwa yang telah terjadi tersebutlah, peneliti mengaitkan dengan teori kekuasaan Machiavelli, hingga terlihat nyata bentuk dari pemikirannya terhadap berbagai praktek kekuasaan untuk kestabilan negara dan penghindaran konflik.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak urung jauhnya tinjauan dari penelitian sebelumnya. Bahwasanya hasil tulisan yang menyangkut pemikiran Machiavelli telah beberapa hadir. Baik mengenai konsep politiknya secara umum, bahkan konsep kekuasaannya. Dari penelitian ini, yang paling terkait dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jusmalia Oktaviani dan temannya Teguh Puja Pramadya, dalam tulisan dengan judul “ Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli. Dari hasil analisis penulis terhadap tulisan tersebut, dilihat bahwa dasar dari penelitian yang dilakukan adalah adanya beberapa oknum yang ingin kembali berada dalam kondisi di masa Orde Baru, karena memiliki anggapan bahwa pada masa Orde Baru lebih stabil dalam politik dan ekonomi. Tulisan tersebut juga menghasilkan bahwa Orde Baru dan pemikiran kekuasaan yang digambarkan oleh hobbes dan Machiavelli memiliki kesamaan, yaitu menempatkan kesatuan negara sebagai yang utama, yang membuat negara menjadi stabil, yang merupakan tulisan yang beranjak dari praktek kepada teori. Sedangkan yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan penulis sekarang ini, adalah dilihat dari lamanya kekuasaan Orde Baru, dan dalam jabatan presiden Soeharto bertahan, serta apa saja bentuk usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut oleh pemerintah Orde Baru. Dimana tulisan ini beranjak dari teori kepada praktek.

Qamariyah dalam tulisannya “Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli) menyebutkan bahwa gagasan kekuasaan yang dipaparkan Machiavelli, tidak jauh digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, yang mana dapat dilakukan dengan nilai kemanusiaan bahkan menghilangkan nilai kemanusiaan tersebut (Qamariyah, 2024).

Kemudian hasil tulisan dari Attahara, menyatakan bahwa dalam meraih sebuah kekuasaan, walaupun memiliki yang bertentangan dengan moral, dalam pandangan Machiavelli, hal tersebut bisa diberikan kebenaran (Attahara, 2020). Dalam ingin melihat berbagai praktek yang dikaji dalam pembahasan ini, dalam masa Orde Baru, yaitu dalam jabatan Presiden Soeharto, peneliti meninjau dari hasil tulisan- tulisan sejarah. Sehingga terlihatlah pula bagaimana praktek politik zaman pemerintahan jabatan presiden Soeharto, yang tergambarkan dari teori kekuasaan Machiavelli.

Dalam penelitian ini, akan memaparkan teori kekuasaan Machiavelli, bagaimana konsep dan bentuk prakteknya, hingga kesinambungan pula dalam praktek kekuasaan dalam jabatan presiden Soeharto. Pembahasan dimulai dari pengenalan singkat dan tercermin dari tokoh Machiavelli, serta bagaimana latar belakang kehidupan budaya, sosial, dan politik beliau, yang menyebabkan beliau memiliki konsep dan pandangan dalam kekuasaan politik. Pembahasan

berikutnya memasuki ranah pemikiran Machiavelli dalam berpolitik, menganalisis pemikiran beliau dan melihatnya dalam sebuah praktek politik yang nyata. Kemudian dengan adanya histori dalam berpolitik presiden Soeharto, dilihat dan dianalisislah bentuk-bentuk praktek yang tergambar dari konsep kekuasaan Machiavelli. Pemaparan mengenai kekuasaan politik dan prakteknya ini, dapat memberikan kontribusi pemahaman lebih dalam, dalam berpolitik dan bagaimana politik seharusnya dijalankan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek yang diteliti (Waruwu, 2023). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara proporsional fenomena politik serta menganalisisnya secara menyeluruh dalam konteks historis. Dalam kerangka ini, peneliti berupaya menafsirkan praktik politik Presiden Soeharto dengan mengacu pada teori kekuasaan Machiavelli, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi peristiwa, melainkan juga pada pemaknaan konseptual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis atau kesejarahan, yang bertujuan untuk menempatkan kerangka berpikir dan interpretasi penelitian dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya (Sunggono, 2001). Melalui pendekatan ini, praktik politik Soeharto dianalisis bukan sekadar sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai bagian dari proses historis yang dapat dikaitkan dengan teori kekuasaan. Pendekatan historis membantu peneliti menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan politik tertentu, seperti pembungkaman pers atau operasi militer, dapat dipahami sebagai strategi kekuasaan yang sejalan dengan pemikiran Machiavelli.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah karya Machiavelli yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Machiavelli, 2022), sementara sumber sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal yang relevan dengan teori kekuasaan dan praktik politik Orde Baru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Pringgar & dkk, 2020). Data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis melalui penggambaran pemikiran Machiavelli dan kemudian dikaitkan dengan praktik politik Presiden Soeharto. Analisis dilakukan dengan titik relevansi, yaitu memastikan adanya kesesuaian antara konsep teori dan fakta sejarah, sehingga diperoleh interpretasi yang mendalam (Bakker & Zubair Charris, 1994).

3. Hasil dan Pembahasan

Biografi Singkat Machiavelli

Niccolò Machiavelli adalah filsuf politik dari dunia Barat pada zaman Renaisans. Ia lahir di Florence, Italia, pada 3 Mei 1469, tidak lama setelah Lorenzo Agung naik takhta menggantikan ayahnya, Piero de' Medici (Rapar, 1991). Ayahnya, Bernardo Machiavelli, berasal dari keluarga bangsawan dan berprofesi sebagai ahli hukum, sedangkan ibunya bernama Bartolomea Distefano Nelli. Sejak kecil Machiavelli memperoleh pendidikan yang baik dari ayahnya, dan kemudian menempuh studi lebih lanjut di Universitas Degli Studi di Ferenze. Ia dikenal sebagai bapak filsafat politik modern karena kemampuannya dalam matematika, retorika, dan bahasa Latin (Rapar, 1991).

Karya-karya Machiavelli cukup beragam, meliputi bidang sastra, militer, dan politik. Dalam kesusastraan, ia menulis drama *Mandragola* (1520, dicetak 1524) serta cerita pendek *Belfagor*.

Dalam bidang militer dan sejarah ia menghasilkan *The Art of War* serta *History of Florence*. Sementara itu, gagasannya mengenai politik termaktub dalam *Discorsi* dan *Il Principe*. Buku *Il Principe* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Prince* dan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sang Pangeran* berisi panduan bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaan dengan tindakan yang efektif, meskipun bertentangan dengan moral. Baginya, yang terpenting adalah keberhasilan tindakan tersebut, bukan cara kerjanya. Relevansi pemikirannya bertahan hingga lima abad kemudian karena bersifat empiris, realistis, berorientasi pada tujuan, dan sebagian besar deskriptif. Hal ini pula yang membuat gagasannya dipandang paralel dengan teori modern tentang pengambilan keputusan (Neuhaus, 2024).

Machiavelli hidup dalam kondisi politik Italia yang bergejolak. Pada masa itu Italia terpecah menjadi lima negara, yaitu Milan, Venice, Naples, Negara-Negara Paus, dan Florence. Perebutan kekuasaan melibatkan negara-negara besar seperti Spanyol, Prancis, Jerman, dan Kekaisaran Romawi Suci. Demi mempertahankan kedudukan, negara-negara Italia sering bersekutu dengan kekuatan asing (Schmandt, 2002). Pada 1494, ketika Machiavelli berusia 25 tahun, Raja Charles VIII dari Prancis menyerbu Italia. Serangan ini menggulingkan keluarga Medici di Florence dan mengantarkan Piero Soderini ke tampuk kekuasaan. Pada masa Republik Soderini, Machiavelli diangkat menjadi Kepala Kantor Arsip Umum Kedua Republik sekaligus Sekretaris Sepuluh Kebebasan dan Perdamaian, sebuah lembaga yang mengatur militer dan urusan luar negeri. Dalam karier diplomatiknya, ia menjalankan sekitar tiga puluh misi luar negeri, termasuk ke Prancis bertemu Raja Louis XII dan Kardinal Rouen, serta ke Romagna dan Roma untuk berhubungan dengan Cesare Borgia. Di Roma, ia menyaksikan jatuhnya kekuasaan Borgia setelah wafatnya Paus Alexander VI, sekaligus mengamati cara brutal Cesare Borgia mengembangkan kekuasaan. Ia juga sempat melakukan misi kepada Paus Julius II dan Kaisar Maximilian (Rapar, 1991).

Tahun 1512 menjadi titik balik kariernya. Spanyol memasuki Florence dan memulihkan kekuasaan Medici, sehingga Republik Soderini tumbang. Pada 1513, Machiavelli diberhentikan dari jabatannya, dipenjara, dan disiksa karena dituduh bersekongkol melawan Medici. Ia akhirnya dibebaskan berkat bantuan sahabat-sahabatnya. Dalam masa pengasingan, ia menulis *Il Principe* dan mendedikasikan kepada Lorenzo de' Medici. Dalam dedikasi tersebut, ia menegaskan bahwa sumber kebijaksanaan politiknya berasal dari pengalaman panjang dalam urusan kontemporer dan pembacaan intensif terhadap sejarah kuno. Bagi Machiavelli, seorang penguasa harus memiliki pandangan jauh ke depan, mampu menilai tantangan politik, dan segera mengambil langkah efektif demi menjaga stabilitas negara. Ia memperingatkan bahwa orientasi pada kepentingan masa kini saja berbahaya karena manusia cenderung puas dengan keadaan saat ini dan lalai memikirkan masa depan (Haddad & Higuera, 2020).

Setelah itu, Machiavelli hidup relatif terasing di perkebunan kecilnya di Sant'Andrea di Percussina hingga wafat pada 1527 (Atthahara, 2020). Ia dimakamkan di Gereja Santa Croce, Florence, sebuah tempat yang juga menjadi makam tokoh-tokoh besar Italia. Meskipun karier politiknya berakhir tragis, pemikirannya tetap hidup dan berpengaruh jauh melampaui zamannya. Karyanya berhasil menghadirkan realisme politik yang meletakkan kekuasaan sebagai tujuan utama keberlangsungan negara, meskipun harus menanggalkan norma moral. Melalui *Il Principe* dan karya-karya lainnya, Machiavelli menghadirkan sebuah paradigma baru tentang politik yang realistis, di mana kekuasaan ditempatkan sebagai sarana utama menjaga keberlangsungan negara. Dalam pandangannya, legitimasi kekuasaan tidak selalu harus dibatasi oleh moralitas atau etika, melainkan ditentukan oleh keberhasilan penguasa menjaga stabilitas

dan keamanan (Nederman, 2005). Cara berpikir inilah yang menjadikan Machiavelli dianggap sebagai pelopor realisme politik modern.

Gagasan Machiavelli kemudian banyak menuai kontroversi, karena bagi sebagian orang ia dipandang sebagai pengusung politik yang kejam dan manipulatif. Namun bagi kalangan lain, ia dianggap jujur dalam menggambarkan kenyataan politik, bahwa penguasa sering kali harus membuat keputusan sulit yang tidak sejalan dengan nilai moral demi mempertahankan negara. Relevansi pemikiran tersebut menjelaskan mengapa karya Machiavelli bertahan lebih dari lima abad, terus diperdebatkan, dan bahkan masih dapat digunakan untuk membaca praktik kekuasaan di berbagai konteks modern, termasuk dalam sejarah politik Indonesia. Oleh karena itu, biografi singkat ini menjadi pintu masuk penting untuk memahami lebih jauh konsep kekuasaan Machiavelli dan bagaimana pemikirannya dapat digunakan untuk menganalisis praktik politik pada masa Orde Baru.

Kekuasaan Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Politeia*, yang memiliki arti polis (kota), bagaimana cara memimpin kota (Ramadhani et al., 2022). Politik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berurusan dengan ketatanegaraan yang bersangkutan dengan pengaturan pemerintah, dimana didalamnya terdapat sistem, kebijaksanaan, bahkan siasat, baik urusan dalam negeri dan maupun urusan luar negeri. Bahkan politik juga berkaitan dengan seseorang yang mendapatkan sesuatu, kapan memperoleh, dan bagaimana cara memperoleh sesuatu (Matulesy, 2018).

Seringkali dijumpai dalam politik praktis, baik dalam sejarah hingga dalam kehidupan di zaman sekarang, politik digunakan untuk meraih dan mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan dapat dipahami sebagai kemampuan yang ada pada suatu individu ataupun kelompok dalam memberikan pengaruh kepada individu dan kelompok lain agar sesuai dengan keinginan dan tujuan dari si pelaku yang berkuasa (Matulesy, 2018). Politik digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan, serta untuk mengendalikan kekuasaan, dan adanya kekuasaan didorong oleh adanya kepentingan tertentu dari seseorang yang cenderung digunakan untuk mengendalikan situasi dan kondisi. Begitu juga dengan kekuasaan, dimana kekuasaan menjadi tujuan penting dari adanya aktivitas politik.

Terkait dengan dari mana sumbernya suatu kekuasaan, menurut Plato, hal yang menjadi sumber kekuasaan adalah ilmu pengetahuan atau filsafat, dimana menyatakan pengetahuanlah satu-satunya yang dapat memberikan bimbingan dan memberikan jalan kepada manusia dalam memberikan pengenalan yang benar menyangkut keberadaan dalam dunia pikiran atau ide. Sedangkan menurut Aristoteles, yang menjadi sumber kekuasaan adalah hukum, menurutnya ada kedaulatan dan wibawa yang tinggi dalam hukum. Aristoteles menyatakan demikian, karena hanya hukum yang sanggup memberikan jalan tuntunan kepada pemerintah dan kepada yang diperintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum (Rapar, 1991).

Kekuasaan politik menurut para filsuf Yunani dan Romawi, pada umumnya mempersatukan antara kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, dan keadilan, serta kebebasan. Dan dengan demikian juga, bagi para pemikir yang memiliki sifat religius yang kuat, kekuasaan mereka hubungkan dengan Tuhan, yang menganggap bahwa kekuasaan politik digunakan hanya sebagai alat dalam pengabdian terhadap negara, dimana pelaksanaannya bersifat agung dan mulia, yang terdapat didalamnya kebaikan, dan kebebasan yang didasarkan dengan kehendak

Tuhan dan ditujukan untuk memuliakan Tuhan (Rapar, 1991). Dari pernyataan pemikir religius tersebut, maka dikatakan bahwa kekuasaan tidak boleh terlepas dari kebaikan, kebajikan, keadilan, dan kebebasan. Namun lain halnya dengan pemikiran Machiavelli yang berbeda dengan pendapat diatas, yang tidak menerima bahwa kekuasaan dibatasi oleh sebuah etika dan kebajikan.

Jabatan Presiden Soeharto

Presiden Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia, dimana masa jabatannya disebut sebagai masa orde baru. Pada 27 Maret 1968, Soeharto menjabat sebagai Presiden, dimana sebelumnya menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera pada tahun 1966 dan diangkat menjadi Pejabat Presiden pada 1967 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Awal mula terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia adalah saat keberhasilan dalam memberantas Gerakan 30 September dan menyatakan dirangnya Partai Komunis Indonesia. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai Presiden pada 12 Maret 1967, dan mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno. Soeharto dalam memimpin Indonesia dipilih kembali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Berakhirnya Kekuasaan Soeharto yaitu, pada 21 Mei 1998 dengan mengundurkan diri, kemudian terjadinya kerusuhan 1998 yakni ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Soeharto sebagai presiden Indonesia menjabat selama 32 tahun (Juang Intan Pratiwi et al., 2021). Dalam pemerintah Soeharto memiliki sumber kekuasaan adalah represi, dimana adanya kekerasan yang dipakai untuk menekan gejolak politik untuk kestabilan politik. Kemudian Soeharto menggunakan hasil sektor perekonomian berupa hasil minyak yang diekspor dan segala sesuatu dari alam untuk membeli dukungan dari elite politik (Farchan, 2022).

Praktik Kekuasaan Politik Machiavelli dalam Jabatan Presiden Soeharto

Politik ibarat bagaimana suatu negara bisa mempertahankan wilayahnya atau mempertahankan diri si penguasa, agar tetap bertahan dan awet dalam menguasai sesuatu. Bisa dilihat bahwa dalam pandangan tersebut seorang penguasa hanya akan mengandalkan pasukan militernya yang dijadikan benteng saja dan penguasa tersebut tidaklah mandiri. Seorang penguasa akan bisa menyingkirkan pemberontak yang menentanginya. Orde Baru memiliki kelebihan, dimana kelebihannya terlihat pada salah satu sektor pemerintahan, terlihat didalamnya terdapat kemampuan dalam menciptakan stabilitas politik dengan pemerintahan yang kuat. Walau pada awal kekuasaan Orde Baru banyaknya masalah politik dan kestabilan negara yang dibawa pada masa Soekarno, yang membuat adanya pengaruh kemiliteran terhadap politik Indonesia, yang kemudian pada tahun 1980, menyebabkan Indonesia berada terlalu jauh masuk dalam pada kekuasaan Soeharto, yang bersifat diktator (Farchan, 2022). Dengan pemulihan oleh militer, maka berangsurlah kestabilan politik di Indonesia. Stabilitas yang menyebabkan masa Orde Baru mampu menaikkan dan menumbuhkan dasar-dasar untuk menciptakan kesuksesan pada sektor lainnya, yang paling utama adalah untuk memasukkan investasi dari negara asing, yang bisa membuat ekonomi menjadi bertumbuh. Dari berbagai peristiwa yang terjadi pada pemerintahan jabatan Soeharto terdapat gambaran pemikiran Machiavelli.

1. Pembunuhan masal

Pembunuhan tersebut ditujukan terhadap siapa saja yang berkaitan dengan Komunis, karena komunis memiliki citra yang tidak baik. Sebelumnya, kelompok PKI pada 30 September 1965, berdasarkan berbagai sumber, mereka melakukan perbuatan keji dengan membunuh enam perwira tinggi oleh kelompok satu Batalyon Cakrabirawa dibawah komando letkol Inf Untung, dimana jasad mereka ditemukan pada sebuah sumur lama di Lubang Buaya, dekat Pangkalan Halim Perdanakusuma. Dengan adanya peristiwa tersebut, munculah peristiwa lain, dimana puluhan ribu masyarakat dan perwira angkatan darat diculik dan dibunuh. Dan yang ditargetkan adalah semua anggota yang dituduh sebagai anggota PKI. Pembunuhan masal sebagian besar berada dibawah perintah kekuasaan dan kewenangan Soeharto demi keamanan negara atas nama keadilan dan menghancurkan PKI (Mukti & Permana, 2023). Dari tujuannya lah tergambar pemikiran Machiavelli, bahwa kewenangan atas kekuasaan Soeharto digunakan demi negara, dengan cara yang tidak bermoral, yaitu berupa pembantaian.

2. Penembakan Misterius

Penembakan misterius atau Petrus dianggap tidak bermoral dan tidak manusiawi karena dilakukan tanpa proses hukum yang adil. Penembakan misterius terjadi pada tahun 1983, terutama di Jakarta, dimana tidak diketahuinya pelaku penembakan. Namun, penembakan diduga berasal dari aparaturnya keamanan, dan anggota kepolisian. Sasaran dari penembakan ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai penjahat kelas tinggi, yang dianggap meresahkan masyarakat (Bone, 2021). Penembakan dilakukan dalam rangka memberikan solusi dan menghalangi tingkat kejahatan yang sangat tinggi pada masa tersebut. Awal mulanya Petrus hanya operasi penanggulangan kejahatan, dimana dalam bentuk penangkapan dan pembunuhan, karena pelaku yang melakukannya tidak ada yang tahu dan tidak terungkap, maka muncul istilah Petrus. Petrus terjadi kisaran tahun 1983 hingga 1985, para korban Petrus ditemukan dalam keadaan tangan serta leher terikat. Sebagian besar, dari para korban ditinggal dipinggir jalan dan dibungkus karung. Penembakan ini seperti pembunuhan berantai dimana memiliki pola yang sama, dimana korban diculik oleh orang asing dan dijemput oleh aparaturnya keamanan (Rusfat et al., 2022). Peristiwa tersebut melihatkan praktik kekuasaan yang tanpa adanya moral.

3. Pembungkaman Rakyat

Pembungkaman rakyat dilakukan oleh pemerintah dengan pemberhentian pers. Pers yaitu mediator antara masyarakat dan negara sebagai pihak yang menengahi antara keduanya. Jika pers memberikan dampak kepada negara, maka pers akan ditakuti. Pers sangat berperan penting jika terjadi situasi perubahan politik yang besar dan menentukan bagaimana jalannya pemerintahan untuk kedepannya. Bagi seseorang dan kelompok yang berkuasa, penguasaan terhadap pers harus dilakukan, agar kekuasaannya tidak diganggu oleh kelompok lain. Kegunaan pers bagi yang tidak memiliki kekuasaan, pers digunakan untuk mewakili suara rakyat agar sampai keteling penguasa. Dengan pengontrolan pemerintah terhadap pers, maka suara rakyat tidak tersalurkan, dengan tujuan keamanan, yang berupa ideologi. Cara penguasa mengontrol pers adalah dengan memasukkan aparaturnya negara dan mencampuri organisasi pers, juga dalam tindakan yang merumuskan larangan-larangan, mengatur kebijakan negara, yang mengatur segala tindakan aparaturnya negara dan warga (Eddyono, 2021). Meskipun pers adalah tidak milik penguasa, namun dengan gerakan penguasa, pers terpaksa menurut kepada penguasa

demikian mendukung legitimasi kekuasaannya. Dengan demikian adanya hak yang hilang dari masyarakat dalam informasi oleh pers Orde Baru.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep kekuasaan Machiavelli yang menekankan pentingnya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk melalui tindakan yang bertentangan dengan moral, tercermin dalam praktik politik Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Peristiwa pembunuhan massal pasca-1965, penembakan misterius pada 1980-an, serta pembungkaman pers merupakan contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjaga stabilitas dan mengamankan rezim. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Soeharto tidak secara langsung merujuk pada pemikiran Machiavelli, praktik kekuasaan yang ia jalankan sangat sesuai dengan prinsip Machiavellian. Politik dijalankan secara realistis dan utilitarian, di mana tujuan utama bukanlah mempertahankan moralitas, melainkan memastikan keberlangsungan kekuasaan dan stabilitas negara. Dengan demikian, teori Machiavelli menjadi lensa analitis yang tepat untuk membaca strategi kekuasaan Orde Baru.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kekuasaan otoritarian di Indonesia pada masa Orde Baru tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kontrol informasi dan represi terhadap masyarakat sipil. Kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan pemerintah membuktikan bahwa kekuasaan dipertahankan melalui kombinasi antara kekerasan, manipulasi, dan legitimasi formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Machiavelli bahwa seorang penguasa perlu menggunakan segala instrumen yang tersedia demi menjaga posisinya. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana teori kekuasaan Machiavelli dapat digunakan untuk memahami praktik politik Soeharto pada masa Orde Baru. Hasil kajian ini memberikan kontribusi terhadap literatur politik Indonesia dengan menunjukkan relevansi teori klasik dalam membaca praktik kekuasaan modern. Lebih jauh lagi, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan yang dapat menghubungkan teori-teori politik Barat dengan realitas historis Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika kekuasaan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Atthahara, H. (2020). Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 85-100. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/261>
- Bakker, A., & Zubair Charris, A. (1994). *Metode Penelitian Falsafat*. Kanisius.
- Bone, S. (2021). Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP*, 29(1), 15-25.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ag.v29i1.13445>

- Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 53–60. <https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.5672>
- Fahrezy, A. F., & Al-Hamid, R. (2021). Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Dinasti Umayyah. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2), 143–164. <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2866>
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 115. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>
- Haddad, K. H., & Higuera, C. M. (2020). Seeing What Is Said: Teaching Niccolò Machiavelli's. *PS: Political Science & Politics*, 54(3), 1–22. <https://doi.org/10.33774/apsa-2020-0wk0k>
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, & Siti Ulfah. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>
- Latif, M. A. (2024). Pengertian Etika Politik serta Pendapat Ibnu Taimiyah. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4(1), 11–20. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i1.3036>
- Machiavelli, N. (2022). *Sang Penguasa terjemahan oleh Saut Pasaribu*. Kakatua.
- Matulesy, A. (2018). *Psikologi Politik*. Intrans Publishing.
- Mukti, A. J. N., & Permana, J. I. (2023). Dampak Pelanggaran HAM 1965 (Pengaruhnya Terhadap Peluang Pendidikan Kaum Muda Indonesia). *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 17(1), 105. <https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p105-122>
- Nederman, C. J. (2005). *Machiavelli's political thought*. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Fall 2005 Edition). Stanford University. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/machiavelli/>
- Neuhaus, T. (2024). Scholars of Decision Making: A (Nudge) Psychological Reading of Niccolo Machiavelli's The Prince. *Brolly. Journal of Social Sciences*, 5(2), 79–90. <https://journals.lapub.co.uk/index.php/brolly/article/view/2715>
- Pringgar, & dkk. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(1), 317–329. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>
- Qamariyah, N. (2024). Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli). *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(3), 3352–3360. <https://doi.org/10.30998/herodotus.v6i3.15729%0D>

- Ramadhani, P. S., Yani, D. F., Lubis, D. M., & Maidina. (2022). Kekuasaan dan politik dalam organisasi. *Journal of Resources and Reserves (JRR)*, 4(1), 1–5. <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/jpp/article/view/208>
- Rapar, J. . (1991). *Filsafat Politik Machiavelli*. Rajawali Press.
- Rusfat, M. Y., Aziz, S. A., & Ulviani, M. (2022). Kesenjangan Sosial dalam Puisi Mata Luka Sengkon Karta Karya Peri Sandi Huizche. *Jurnal Konsepsi*, 11(02), 321–332. <https://www.p3i.my.id/index.php/konsepsi/article/view/207/205>
- Schmandt, H. j. (2002). *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Pustaka Pelajar.
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560>
- Sunggono, B. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum* (cet. Ke-II). Raja Grafindo.
- Syarofuzzaman, A. fatih. (2024). Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 22–29. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.11833>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>